

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA YANG ADA DI ARAB SAUDI DITINJAU  
MELALUI UU NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG  
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



Diajukan oleh:

Nama : Lucia Magdalena

NIM : 15.400.500.36

Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia

2019

## **VISI & MISI**

### **Visi Universitas Kristen Indonesia**

Menjadi universitas unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.

### **Misi Universitas Kristen Indonesia**

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten dibidangnya serta mampu bersaing di era global.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan institusi nasional/internasional yang saling menguntungkan, dan dengan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

**HALAMAN PENGESAHAN****PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA DITINJAU  
MELALUI UU NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA****Skripsi**

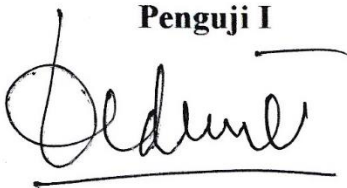
Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Nama : Lucia Magdalena

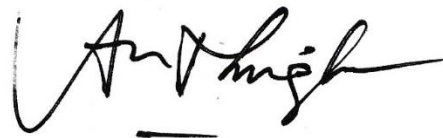
NIM : 15.400.500.36

Telah dipertahankan di depan tim penguji

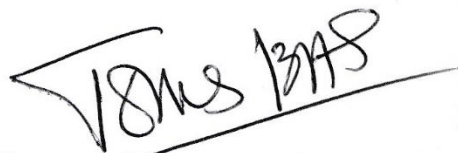
Pada tanggal 14 Februari 2019 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat  
untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

**Susunan Tim Penguji,****Penguji I**

(I Dewa Ayu, S.H., M.H.)

**Penguji II**

(Anthon Nainggolan, S.H., M.H.)

**Penguji III**

(Tomson Situmeang, S.H., M.H.)

**HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG**

PESERTA UJIAN

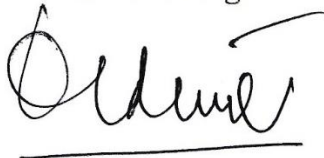
Nama : Lucia Magdalena

NIM : 15.500.400.36

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA DITINJAU  
MELALUI UU NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Disetujui,

Pembimbing I



(I Dewa Ayu, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Anthon Nainggolan, S.H., M.H.)

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Administrasi Negara



(I Dewa Ayu, S.H., M.H.)

## **KATA PENGANTAR**

Syalom,

Terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah melimpahkan semua kasih karunianya hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang diberi judul “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia yang ada di Arab Saudi ditinjau melalui UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”.

Penulis dalam skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia, yang pada dasarnya sering sekali terjadi kasus kasus mengenai PMI di Luar Negeri, karena itulah penulis tertarik untuk membuat penelitian ini menjadi karya terakhir penulis pada akhir masa kuliah S1. Karya ini diharapkan dapat menambah pandangan bagi siapapun yang membacanya, yang tentu saja tidak lepas dari kesalahan yang dilakukan penulis.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI)
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum UKI
3. Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum UKI
4. Ibu I Dewa Ayu, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Anthon Nainggolan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing kedua yang juga telah berbaik hati membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Edward M. L. Panjaitan selaku Kepala Bagian Hukum Internasional yang juga turut memberikan arahan dari awal pembuatan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Gindo L. Tobing selaku Dosen Pembimbing Akademis penulis yang telah membimbing dari awal perkuliahan hingga pada akhir pembuatan skripsi ini.
8. Para Dosen dan Staf Fakultas Hukum UKI yang telah membantu dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku yang telah banyak memberikan doa, nasihat, dorongan hingga bantuan finansial hingga pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

10. Kedua adikku yang telah memberikan dorongan dan semangat yang telah diberikan.
11. Teman-teman seperjuanganku dalam menulis skripsi, Merry Yenni Dameria dan Natalia Sitaniapessy yang telah saling menyemangati dalam proses yang tidak mudah ini.
12. Teman-teman yang telah menemani ku selama ini, Maya Puspita Dandel, Erna Basania Siahaan, Indah Dwi Arista dan Laura Tabita, terimakasih telah memberikan banyak motivasi, bantuan, dan doanya
13. Teman-teman angkatan 15 Fakultas Hukum UKI dan juga kakak tingkat sampai dengan adik tingkat yang mewarnai kehidupan kampus penulis.
14. Seseorang yang belum bisa disebut namanya saat ini, yang akan menemaniku kelak karena belum ditemukan.
15. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan serta bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis mengucapkan terima kasih atas selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menjadi sambungan ilmu pengetahuan bagi kehidupan.

Jakarta, 14 Februari 2019

Penulis,

(Lucia Magdalena)

### **ABSTRAK**

- A. Nama Mahasiswa : Lucia Magdalena
- B. Nomor Induk Mahasiswa : 15.400.500.36
- C. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pekerja Migran  
Indonesia yang ada di Arab Saudi ditinjau  
melalui UU No18 Tahun 2017 tentang  
Pelindungan PekerjaMigran Indonesia
- D. Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
- E. Jumlah Halaman : xi + 118 halaman
- F. Daftar Bacaan : 29 Buku, 7 Jurnal, 14 Website, 5 Undang-  
Undang
- G. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Migran  
Indonesia, Arab Saudi
- H. Ringkasan Isi :

Setiap CPMI/PMI mempunyai hak memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak pemerintah, swasta, dan mitra usaha luar negeri wajib memberikan perlindungan terhadap PMI di Negara manapun mereka berada, koordinasi dari para pihak tersebut sangat dibutuhkan demi tercapai perlindungan terhadap keselamatan PMI. Maraknya kasus PMI di Arab Saudi yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap PMI belum dilakukan dengan maksimal. Pemerintah pun berupaya kuat dalam melindungi PMI tetapi tidak dipungkiri masih adanya faktor dalam menghambat upaya pemerintah.

Berdasarkan permasalahan yang di teliti maka metode penelitian hukum yang dipakai bersifat normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan, dimana penulis menggambarkan perlindungan hukum PMI sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dari hasil penelitian terhadap bentuk perlindungan terhadap PMI yang ada di dalam UU No. 18 Tahun 2017 yakni dimulai dari sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Faktor-faktor yang dapat menghambat pemerintah dalam melindungi PMI yakni perbedaan wilayah hukum, yaitu wilayah hukum nasional dan wilayah



hukum Negara penerima/tempat dimana tenaga kerja tersebut bekerja. Untuk menjamin perlindungan dari PMI alangkah lebih baik bila pemerintah meningkatkan pembinaan dan penyuluhan bagi para CPMI yang akan bekerja, sehingga para PMI siap untuk diterjunkan.

Jakarta, 14 Februari 2019

A. Pembimbing :

Penulis:

Pembimbing I : I Dewa Ayu, S.H., M.H

Pembimbing II: Anthon Nainggolan, S.H., M.H

Lucia Magdalena

### **ABSTRACT**

Each the candidates of migrants workers have the right to be protected in accordance with the legislation in force. Government, private (recruitment agency), and overseas business partners are required to provide protection to migrant workers any country they are in, the coordination of the parties is necessary in order to achieve the protection of the safety of workers. The rise of cases in Saudi Arabia involving migrant workers recently showed that the protection of migrant workers has not been carried out to the maximum by the parties. The government also tried their best in protecting the PMI but it was undeniable that there were still factors in hampering the government's efforts.

Based on the problems examined, the legal research method that being used is normative. With a legal approach, where the author describes the legal protection of PMI in accordance with applicable regulations.

From the results of form of migrants workers protection in Act No. 18, 2017, starting from before, during, and after work. Factors that can block the government in protecting migrant workers are differences in jurisdiction, that is the national jurisdiction and the jurisdiction of the receiving country or the place where the migrant workers works. To guarantee the protection of migrant workers, furthermore it would be better if the government increased coaching and counseling for the candidates of migrants worker that would work, so that they were ready to work overseas.

## DAFTAR ISI

<b>VISI &amp; MISI</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	20
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	21
E. Metode Penelitian.....	21
F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	26
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PEKERJA MIGRAN INDONESIA</b> .....	29
A. Tenaga Kerja Indonesia.....	29
1. Pengertian Tenaga Kerja.....	29
2. Pengertian Calon Tenaga Kerja Indonesia.....	32
3. Ruang Lingkup Tenaga Kerja.....	33
4. Objek Hukum Ketenagakerjaan.....	33
5. Asas-asas Negara Hukum.....	34
6. Landasan dan Asas Hukum Ketenagakerjaan.....	35
7. Perjanjian Kerja.....	36
9. Pengertian Pekerja Migran Indonesia.....	42
10. Jenis Pekerja Migran Indonesia.....	42
11. Syarat menjadi Pekerja Migran Indonesia.....	42
12. Asas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.....	43

13. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) .....	43
B. Perlindungan Hukum .....	44
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	44
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	46
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum .....	47
4. Perlindungan Kerja .....	48
C. Teori Kedaulatan.....	49
1. Pengertian Teori Kedaulatan .....	49
D. Penempatan PMI.....	52
1. Pengertian Penempatan Pekerja Migran Indonesia .....	52
2. Dasar Hukum Tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.....	53
3. Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.....	55
<b>BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PMI MENURUT UNDANG-UNDANG 18 TAHUN 2017 .....</b>	<b>58</b>
A. Latar Belakang Munculnya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 ....	58
1. Penjelasan tentang UU No. 18 Tahun 2017.....	62
B. Penempatan Pekerja Migran di Luar Negeri.....	66
1. Pihak – pihak yang Terkait dalam Penempatan PMI di Luar Negeri .	66
C. Perlindungan PMI di Luar Negeri Menurut UU PPMI.....	70
1. Pengertian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.....	70
2. Jenis-jenis Pelindungan Pekerja Migran Indonesia .....	71
3. Bentuk Perlindungan dari UU PPMI .....	76
<b>BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT USAHA PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI PMI DI LUAR NEGERI .....</b>	<b>84</b>
A. Perlindungan PMI Setelah di Resmikannya UU No. 18 Tahun 2017.....	84
1. Perubahan Bentuk Perlindungan pada UU PPMI.....	84
2. Perkembangan Kasus PMI Setelah di Resmikannya UU PPMI .....	87
B. Usaha Pemerintah dalam Perlindungan PMI .....	89
1. Peran Pemerintah dalam Melindungi PMI .....	89
2. Peran Pemerintah Menangani PMI Ilegal .....	93

3.	Kendala Pemerintah RI dalam Perlindungan PMI.....	96
4.	Kendala yang Dihadapi Oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja	104
<b>BAB V PENUTUP</b> .....		109
A.	Kesimpulan .....	109
B.	Saran-saran.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		113